

Analisis Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Puskesmas Batua Raya Makassar

Nur Fadillah Hasra ¹, Nur Afiah ², Nuraisyiah ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail : Nurfadillahasrah@gmail.com¹, nurafiah@unm.ac.id², nuraisyiah@unm.ac.id³

Article History:

Received: 06 Maret 2025

Revised: 10 Mei 2025

Accepted: 19 Mei 2025

Keywords:

Sistem
Pengendalian Internal,
Persediaan, Pengendalian
Stok Obat.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal persediaan obat di Puskesmas Batua Raya Kota Makassar. Subjek penelitian adalah pegawai Puskesmas Batua Raya yang terlibat dalam pengendalian internal persediaan. Penelitian difokuskan pada sistem pengendalian internal persediaan obat di puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal, antara lain adalah keterlambatan pengiriman obat dari Dinas Kesehatan. Untuk mencegah terjadinya kekurangan stok, pihak puskesmas dapat melakukan pengadaan secara mandiri dengan menggunakan dana kas negara apabila terjadi keterlambatan pasokan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 4 mengenai kesehatan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Ini mencakup hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan. Hak atas hidup sehat berarti kebebasan untuk mendapatkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin (Rachmat, 2016). Pemerintah menyediakan layanan kesehatan melalui berbagai program, termasuk penyediaan obat-obatan. Ketersediaan obat sangat penting untuk menjamin layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan obat adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal persediaan obat.

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian prosedur dan sistem yang diterapkan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi serta keandalan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan serta kebijakan yang berlaku. Tujuan utama dari pengendalian internal adalah untuk menghindari kesalahan, penipuan, dan penyimpangan lainnya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Sistem ini melibatkan berbagai langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Dewi et al., 2021).

Pengendalian internal persediaan bertujuan untuk melindungi aset perusahaan yang rentan terhadap kerusakan dan pencurian. Kesalahan seperti kerusakan barang, pencatatan yang tidak akurat, permintaan yang tidak sesuai, dan barang yang keluar tidak sesuai pesanan dapat

menyebabkan perbedaan antara catatan persediaan dan persediaan sebenarnya di gudang. Oleh karena itu, pemeriksaan persediaan secara berkala diperlukan untuk memastikan informasi persediaan lebih dapat dipercaya. Sistem dan prosedur yang baik adalah kunci untuk mengendalikan kegiatan dan transaksi, sehingga kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalisir. Kejadian kehabisan persediaan 3-4 jenis obat sering menghambat pelayanan di puskesmas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembelian persediaan obat yang sudah hampir habis tetapi tidak segera dipesan, akibat laporan persediaan yang kurang akurat (Wirawan et al., 2021).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama. Puskesmas bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Puskesmas memiliki peran sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Puskesmas Batu Raya Makassar sebagai salah satu layanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, kuratif, dan preventif. Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah ketersediaan obat yang memadai, berkualitas, dan terjangkau. Obat merupakan sumber daya bernilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi menimbulkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian internal persediaan obat sangat penting bagi Puskesmas, karena dengan adanya pengendalian internal, Puskesmas dapat menjaga persediaan obat serta menentukan jumlah yang dibutuhkan sehingga Puskesmas dapat mengetahui kapan persediaan harus diperbarui saat habis (Najiyah et al., 2020).

Di Puskesmas Batua Raya Makassar, sering terjadi kekosongan 3 (tiga) hingga 4 (empat) jenis obat karena keterlambatan pemesanan, yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam pencatatan persediaan obat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memerlukan perbaikan. Pengendalian internal yang baik harus mampu memastikan bahwa setiap obat yang keluar atau masuk tercatat dengan akurat, serta memastikan bahwa persediaan selalu tersedia sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Puskesmas Batua Raya Makassar dalam pengelolaan persediaan obat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat di Puskesmas tersebut, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian Penulis tertarik untuk meneliti cara pengendalian internal persediaan yang tepat, dengan judul penelitian “Analisis Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Puskesmas Batua Raya Makassar”.

LANDASAN TEORI

Teori Pengendalian Internal (Internal Control Theory) mengacu pada prinsip-prinsip dan sistem yang diterapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional berjalan dengan efisien, aset perusahaan terlindungi, serta laporan keuangan disusun dengan tepat dan akurat. Tujuan utama dari pengendalian internal adalah untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku,

serta memaksimalkan efisiensi operasional dalam Perusahaan (Ngurawan et al., 2021). Teori Manajemen Persediaan (Inventory Management Theory) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola persediaan barang dalam suatu perusahaan secara efisien dan efektif, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa menimbulkan pemborosan biaya atau kerugian. (Rasdiyatno et al., 2024).

Menurut Pujiono et al., (2016) adalah bahwa pengendalian internal memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Fungsi utama pengendalian internal adalah melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi informasi, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengendalian internal juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta menjamin keandalan laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan umumnya memiliki berbagai produk yang tersedia untuk dibeli. Beberapa produk tersebut merupakan bagian dari persediaan (Sulaiman, 2015) Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam usaha, termasuk barang dagangan yang siap dijual kembali atau digunakan dalam produksi. Persediaan mencakup semua sumber daya yang tersedia dalam suatu proses untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan atau masalah lainnya (Munawar & Fudsyi, 2020). Persediaan (inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Yam & Taufik, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Subjek penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Batua Raya Makassar yang terlibat dalam Pengendalian internal Persediaan. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal persediaan obat pada Puskesmas Batua Raya Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, 4) Verifikasi dan Analisis Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, penyamplingan, dan penyajian hasil peringkasan (Indriyanti et al., 2018). Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat di Puskesmas memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan, penggunaan, serta pengamanan obat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan Formularium Nasional, penyusunan Formularium Puskesmas, kerja sama dengan pemasok obat, mekanisme penyediaan untuk mencegah kekosongan persediaan, hingga sistem pengawasan dan pengamanan obat. Berikut tabel penyajian data terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar.

Tabel 1. Penyajian Data Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Persediaan Obat

No	Pengendalian Internal Persediaan	Dokumen	ADA	TIDAK ADA	Keterangan

	Obat				
1	Formularium Nasional dan Formularium Puskesmas	Formularium Nasional	✓		Dapat dilihat pada lampiran 13.
		Formularium Puskesmas	✓		Dapat dilihat pada lampiran 14.
2	Perjanjian Kerja Sama dengan Pemasok Obat			✓	
3	Mekanisme Penyediaan untuk Mengantisipasi Kekosongan persediaan	SOP pengelolaan Obat	✓		Dapat dilihat pada lampiran 15.
		Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)	✓		Dapat dilihat pada lampiran 16.
		Permintaan Obat Khusus	✓		Dapat dilihat pada lampiran 17.
4	Sistem Pengawasan, Penggunaan, dan Pengamanan Obat	Stop Opname	✓		Dapat dilihat pada lampiran 18.
		Sistem Audit Farmasi		✓	

Sumber: Hasil Olah Data dan Dokumentasi

1. Formularium Nasional dan Formularium Puskesmas

Formularium Puskesmas telah disusun sebagai pedoman utama dalam penggunaan obat, namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya di Puskesmas Batua Raya Makassar. Formularium puskesmas memiliki fungsi utama sebagai pedoman bagi dokter dalam resep obat. Obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas harus sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan dalam formularium. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan obat lebih terkontrol, sesuai standar, dan menghindari pemberian obat yang tidak direkomendasikan.

Berdasarkan hasil wawancara informan, beberapa kendala yang sering terjadi dalam implementasi formularium antara lain:

- Tidak semua obat yang dibutuhkan dokter tersedia dalam Formularium Nasional, sehingga puskesmas harus melakukan pengajuan tambahan untuk memasukkan obat-obatan tertentu ke

dalam Formularium puskesmas. Proses ini memerlukan persetujuan dari Dinas Kesehatan dan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama.

b. Proses persetujuan dari Dinas Kesehatan memerlukan waktu, sehingga dapat terjadi keterlambatan dalam penyediaan obat tertentu. Jika ada obat yang tidak tersedia dalam formularium, puskesmas harus melakukan mekanisme pengajuan khusus dengan menyertakan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh kepala puskesmas.

c. Pengelolaan obat yang tidak tersedia dalam formularium memerlukan strategi pengendalian persediaan, seperti substitusi obat dengan alternatif lain yang memiliki efek terapi serupa. Jika obat yang diresepkan oleh dokter tidak tersedia dalam formularium, maka puskesmas dapat melakukan substitusi dengan obat yang memiliki indikasi serupa sesuai dengan daftar formularium yang berlaku.

Penyusunan formularium puskesmas dilakukan oleh tim perencana yang terdiri dari berbagai tenaga medis dan farmasi di puskesmas. Tim ini bertugas memilih obat yang sesuai dari Formularium Nasional untuk kemudian dimasukkan ke dalam formularium puskesmas. Dalam hal ini, tenaga farmasi memiliki peran penting dalam menyeleksi obat yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik pasien dan layanan yang diberikan di puskesmas. Formularium puskesmas disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala puskesmas, tenaga farmasi, apoteker, dokter, bidan, dokter gigi, perawat, dan pemegang program. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang tersedia di puskesmas sesuai dengan kebutuhan medis.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemasok Obat

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan persediaan obat di puskesmas adalah mekanisme kerja yang sama dengan pemasok obat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa puskesmas tidak memiliki kewenangan langsung dalam melakukan perjanjian kerja sama dengan pemasok obat. Seluruh proses pengadaan dan distribusi obat di puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Obat.

3. Mekanisme Penyediaan Obat

Penyediaan obat di puskesmas dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Apabila terjadi kekosongan persediaan obat di instalasi farmasi, maka puskesmas memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat tetap terjaga. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemeriksaan persediaan oleh farmasi, kemudian pembuatan surat permintaan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Jika permintaan disetujui, maka pengadaan obat dilakukan melalui mekanisme belanja katalog elektronik (e-katalog) yang telah ditetapkan.

Pencatatan persediaan obat di Puskesmas Batua Raya menggunakan metode manual dan digital. Metode manual dilakukan dengan cara mencatat keluar-masuknya obat dalam buku persediaan obat harian Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Sedangkan metode digital dilakukan melalui sistem informasi manajemen farmasi yang memungkinkan pencatatan persediaan obat secara real-time, mempermudah pemantauan ketersediaan obat, serta membantu dalam proses perencanaan dan pemesanan obat ke gudang farmasi atau Dinas Kesehatan.

4. Sistem Pengawasan, Penggunaan, dan Pengamanan Obat

Pengawasan dan pengendalian persediaan obat merupakan aspek penting dalam sistem manajemen farmasi di puskesmas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa terdapat beberapa prosedur yang diterapkan dalam pengawasan obat, baik dalam aspek kualitas obat, pencatatan persediaan, hingga penyimpanan obat dengan aman.

Puskesmas Batua Raya Makassar memastikan kualitas obat yang diterima sesuai dengan standar yang berlaku, tenaga farmasi di puskesmas melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi kemasan dan isi obat. Prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Pemeriksaan kondisi kemasan obat , apakah terdapat kerusakan atau perubahan bentuk. Pengambilan sampel obat untuk dicek warna atau kondisi fisiknya . Jika sampel yang diperiksa dalam kondisi baik, maka dianggap seluruh obat dalam satu batch tersebut memenuhi standar kualitas.
- b. Penyimpanan obat di ruangan dengan suhu dan kelembapan yang terjaga, untuk memastikan stabilitas obat tetap terjaga.

Puskesmas Batua Raya Makassar tidak terdapat sistem audit farmasi yang dilakukan secara khusus, Namun tenaga farmasi tetap melakukan persediaan opname rutin untuk menyatukan penggunaan dan distribusi obat di setiap unit pelayanan. Stok opname dilakukan dengan cara memeriksa keselarasan antara jumlah obat secara fisik dan jumlah yang tercatat dalam sistem pencatatan persediaan. Jika ditemukan selisih atau ketidaksesuaian, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Prosedur penyimpanan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar Obat-obatan yang disimpan dan dikelola dengan sistem penyimpanan yang sesuai dengan standar First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO). FIFO Obat yang masuk lebih dulu harus digunakan lebih dulu. FEFO Obat dengan masa kadaluwarsa yang lebih dekat harus digunakan lebih dulu.

Puskesmas memiliki prosedur khusus untuk penyimpanan obat berisiko tinggi, seperti narkotika dan psikotropika. Obat-obatan ini disimpan di ruangan khusus yang terkunci, dengan akses terbatas hanya untuk petugas farmasi yang berwenang.

B. ANALISIS DATA

1. Formularium Nasional dan Formularium Puskesmas

Formularium Nasional telah ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penggunaan obat di puskesmas, termasuk dalam penyusunan formularium puskesmas. Dari data yang telah disajikan, diketahui bahwa penyusunan formularium nasional ddi puskesmas sudah diterapkan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala puskesmas, tenaga farmasi, dokter, bidan, perawat, serta pemegang program kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan telah dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas. Namun penerapan formularium masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah

keterbatasan daftar obat dalam Formularium Nasional, yang mengharuskan puskesmas mengajukan permohonan tambahan obat melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan waktu, sehingga dalam beberapa kondisi, puskesmas harus mencari obat alternatif yang tersedia dalam daftar formularium.

Proses pelaksanaan prosedur pengadaan persediaan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar masih mengandung risiko yang mungkin terjadi, seperti kekosongan atau kekurangan persediaan di gudang , serta risiko dari lingkungan eksternal seperti keterlambatan distribusi dari Dinas Kesehatan, ketersediaan jumlah dan jenis obat yang tidak sesuai dengan permintaan, serta potensi kerusakan obat selama proses distribusi . Risiko-risiko ini dapat berdampak pada lambatnya pelayanan kesehatan serta penurunan efektivitas penggunaan obat bagi pasien.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemasok Obat

Sistem pengadaan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar, menunjukkan bahwa puskesmas tidak memiliki perjanjian kerja sama langsung dengan pemasok obat, karena seluruh

proses pengadaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Obat. Dengan sistem ini, puskesmas hanya bertindak sebagai penerima obat yang telah didistribusikan oleh dinas kesehatan.

Kelemahan dalam sistem ini adalah puskesmas tidak memiliki kendali langsung atas pengadaan obat, sehingga ketika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian atau ketidaksesuaian jumlah obat yang diterima, puskesmas tidak dapat segera mengatasi masalah tersebut tanpa menunggu instruksi dari Dinas Kesehatan.

3. Mekanisme Penyediaan Obat untuk mengantisipasi Kekosongan persediaan

Puskesmas memiliki mekanisme penyediaan obat yang cukup fleksibel, dimana jika terjadi kekosongan persediaan obat, puskesmas dapat melakukan pengadaan mandiri dengan menggunakan dana bendahara. Namun, sistem ini tetap harus melalui proses administrasi yang cukup panjang, di mana tenaga farmasi harus mengajukan permintaan pengadaan ke Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian melalui e-katalog.

4. Sistem Pengawasan, Penggunaan, dan pengamanan Obat

Aspek pengawasan dan pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Batua Raya Makassar telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian, seperti pemeriksaan kualitas obat saat diterima, penyimpanan obat dengan metode *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO), serta pelacakan riwayat penggunaan obat melalui arsip resep pasien. Namun, juga terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengawasan, di antaranya:

- a. Tidak adanya sistem audit farmasi yang dilakukan secara rutin, sehingga efektivitas pengelolaan persediaan obat masih bergantung pada stok opname yang dilakukan tiap bulan.
- b. Sulitnya memantau efek samping obat, karena pasien di puskesmas umumnya hanya mendapatkan layanan rawat jalan dan tidak selalu kembali untuk melaporkan efek samping yang dialami.

Kelemahan dalam pengawasan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sistem audit, penguatan mekanisme pencatatan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko dalam pengelolaan persediaan obat.

C. PEMBAHASAN

Pengendalian persediaan obat internal di puskesmas merupakan aspek penting dalam memastikan ketersediaan obat yang memadai serta mencegah berbagai risiko yang dapat terjadi dalam proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Adapun permasalahan yang terjadi di puskesmas batua raya makassar yaitu sering terjadi kekosongan persediaan akibat keterlambatan pemesanan dan kurangnya ketelitian dalam pencatatan persediaan obat. Berdasarkan hasil penelitian, puskesmas telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian internal, seperti penerapan formularium nasional dan formularium puskesmas, sistem penyimpanan yang sesuai standar, serta pencatatan persediaan obat secara berkala. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan yang dapat meningkatkan risiko dalam pengelolaan persediaan obat.

Salah satu kendala utama dalam sistem pengendalian internal adalah keterbatasan daftar obat dalam Formularium Nasional, yang mengharuskan puskesmas mengajukan permohonan tambahan obat ke Dinas Kesehatan. Proses pengajuan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga berisiko menyebabkan terjadinya atau keterlambatan pendistribusian obat. Selain itu, puskesmas tidak memiliki perjanjian kerja sama langsung dengan pemasok obat, karena seluruh pengadaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui UPTD Pengelolaan Obat. Akibatnya, ketika terjadi keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian jumlah obat yang diterima, puskesmas tidak

dapat mengambil tindakan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun proses penyediaan obat yaitu puskesmas dapat melakukan pengadaan mandiri menggunakan dana bendahara, namun tetap harus melalui prosedur administrasi yang cukup panjang sebelum mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan.

Sistem pengawasan dan pengendalian persediaan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar telah menerapkan prosedur seperti stok opname rutin dan penyimpanan berbasis FIFO dan FEFO untuk memastikan obat digunakan dengan optimal. Namun tidak adanya sistem audit farmasi yang dilakukan secara berkala menjadi kelemahan dalam evaluasi efektivitas pengelolaan obat.

Strategi pengendalian internal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Strategi tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan guna mempercepat proses pengadaan obat, penerapan sistem audit farmasi secara berkala, perbaikan mekanisme otorisasi pemesanan obat, serta peningkatan sosialisasi kepada tenaga medis mengenai daftar obat dalam formularium puskesmas. Audit farmasi yang lebih ketat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan persediaan, sehingga ketersediaan obat lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara puskesmas dan Dinas Kesehatan membantu memastikan distribusi obat berjalan lancar.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan teori sistem dan pengendalian internal adalah Penelitian oleh Limbong et al. (2024) yang menganalisis pengendalian internal persediaan obat di UPT puskesmas Desa Binjai menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pencatatan persediaan, perencanaan pengadaan, serta pemantauan persediaan obat. Hal ini sejalan dengan penelitian saya yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dalam menjaga ketersediaan obat dan mencegah kekosongan persediaan di Puskesmas Batua Raya Makassar.

Najiyah et al. (2021) dalam penelitiannya di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko kekurangan persediaan dan meningkatkan efektivitas distribusi obat. Temuan ini relevan dengan penelitian saya yang juga mengidentifikasi kendala dalam pencatatan persediaan dan distribusi obat di Puskesmas Batua Raya serta pentingnya mekanisme pencatatan yang akurat.

Maruf et al. (2019) dalam studinya di Puskesmas Bahu menyatakan bahwa pemisahan tugas, pencatatan rutin, serta pemantauan berkala sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal persediaan obat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemantauan yang ketat dan pencatatan persediaan yang sistematis sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan obat di Puskesmas Batua Raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat di Puskesmas Batua Raya Makassar, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan, namun masih menghadapi beberapa kendala. Terutama proses pengajuan obat tambahan ke Dinas Kesehatan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga tenaga medis terkadang harus menggunakan obat alternatif yang tersedia dalam formularium.

Selain itu, mekanisme pengadaan obat di puskesmas masih bergantung pada Dinas Kesehatan melalui UPTD Pengelolaan Obat. Hal ini menyebabkan keterbatasan kendali puskesmas terhadap ketersediaan obat, terutama jika terjadi keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian jumlah obat yang diterima. Sistem pencatatan persediaan obat yang telah

menggunakan metode stok opname, FIFO, dan FEFO membantu dalam menjaga akurasi persediaan, namun masih ditemukan kelemahan dalam sistem audit farmasi, sehingga efektivitas pengelolaan obat belum dilakukan. Secara keseluruhan, pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat di puskesmas sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mengurangi risiko ketidakseimbangan persediaan dan meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, U. Ni., Fathurrahmi Lawita, N., & Dian Puji Puspitasari, dan. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Persediaan. *Jurnal Hummansi*, 4. <https://doi.org/10.33488/1.jh.2021.1.277>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152506/permenkesno3tahun2020>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diakses dari <https://peraturanpedia.id/permenpan-rb-nomor-35-tahun-2014/>.
- Maruf, J. M., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat Pada Organisasi Sektor Publik Di Puskesmas Bahu Analysis of Internal Developmnt of Medicine Inventory in Public Sector Organization in Puskesmas Bahu. *Analisis... 3099 Jurnal EMBA*, 7(3), 3099–3108.
- Munawar, Z., & Fudsyi, M. I. (2020). Perbaikan Teknis Sistem Pencatatan Persediaan Barang Berbasis Komputer Bagi Pedagang Buku Pasar Palasari Kota Bandung Menghadapi Era Pasar Kompetitif. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33366/jast.v4i1.1587>
- Najiyah, yati, Eriswanto, E., Kartini, T., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (FINTECH)*, 9(2), 2088–7485.
- Ngurawan, Y. I., Morasa Jenny, & Kapojos. Peter M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT Bank sulut Go. *Jurnal Emba*, 1581–1582.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara).
- Rachmat, R. H. H. (2016). Penguatan upaya Kesehatan Masyarakat bidang Kesehatan di Indonesia.
- Rasdiyatno, R. D., Iqbal, M., & Hasibuan, A. (2024). Manajemen Persediaan Yang Efektif Untuk Mengoptimalkan Operasi Perusahaan Industri. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Limbong, I. N., Sinurat, M., & Hutapea, H. D. (2024). Analisis pengendalian intern persediaan obat-obatan pada UPT Puskesmas Desa Binjai. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(2),

- 971–981. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.2814>
- Sulaiman, F. (2015). Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Menggunakan Metode EOQ pada UD. Adi Mabel. In *Jurnal Teknovasi* (Vol. 02, Issue 1).
- Wirawan, S., Djajadikerta, H., & Setiawan, A. (2021). Penerapan Pengendalian Intern pada 13 UMKM di Bandung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/jab.v10i1.34009>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 98–99.